Nomor Surat	0094/DAR/IV/21
Nama Perusahaan	Duta Anggada Realty Tbk
Kode Emiten	DART
Lampiran	3
Perihal	Penyampaian Bukti Iklan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Dengan ini Perseroan / Emiten menyampaikan bukti iklan tentang Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

yang telah diiklankan di media cetak :

Informasi	Nama Media Cetak	Tanggal Penerbitan
Halaman 6	Investor Daily	01 April 2021
Halaman 10	Harian Ekonomi Neraca	01 April 2021

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Duta Anggada Realty Tbk

Aka Permata

Corporate Secretary

Duta Anggada Realty Tbk

Chase Plaza Tower Lt. 21

Telepon : 520-8000, Fax : 520-8300,

Tanggal dan Waktu	01-04-2021 15:02
Lampiran	1. DART - Bukti Iklan Risalah RUPSLB - Harian Neraca.pdf
	2. DART - Penyampaian Resume dan Bukti Iklan RUPSLB.pdf
	3. DART - Bukti Iklan Risalah RUPSLB - Investor Daily.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Duta Anggada Realty Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Duta Anggada Realty Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	0094/DAR/IV/21
Issuer Name	Duta Anggada Realty Tbk
Issuer Code	DART
Attachment	3
Subject	Advertisement Submission of null

The Issuer has advertised null

on the following news media:

Information	Name of News Media	Publication Date
Halaman 6	Investor Daily	01 April 2021
Halaman 10	Harian Ekonomi Neraca	01 April 2021

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Duta Anggada Realty Tbk

Aka Permata

Corporate Secretary

Duta Anggada Realty Tbk

Chase Plaza Tower Lt. 21

Phone : 520-8000, Fax : 520-8300,

Date and Time	01-04-2021 15:02
Attachment	1. DART - Bukti Iklan Risalah RUPSLB - Harian Neraca.pdf
	2. DART - Penyampaian Resume dan Bukti Iklan RUPSLB.pdf
	3. DART - Bukti Iklan Risalah RUPSLB - Investor Daily.pdf

This is an official document of Duta Anggada Realty Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Duta Anggada Realty Tbk is fully responsible for the information contained within this document.

NERACA/Antarafoto/Ampelsa/aww

PENGOLAHAN PRODUK TURUNAN MINYAK ATSIRI : Mahasiswa yang tergabung dalam Atsiri Research Center (ARC) mengolah minyak atsiri menjadi produk parfum di Laboratorium Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh, Aceh, Selasa (30/3/2021). Atsiri Research Center Universitas Syiah Kuala yang siap membantu pelaku UMKM di daerah itu memiliki sejumlah produk turunan berbahan baku minyak nilam, salah satunya parfum dengan produksi mencapai 3.000 botol per bulan dan tahun 2021 akan mengekspor sebanyak 10.000 botol parfum untuk memenuhi permintaan dari Prancis.

Kelapa Sawit Entaskan Kemiskinan

NERACA

Jakarta - Direktorat Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong kesejahteraan petani sawit. Kementan berpandangan, nilai ekspor produk sawit sebagai sumber devisa yang sebesar 20,25 milliar dollar AS harus linear dengan kesejahteraan petani sawit.

Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Ditjen Perkebunan Kementan Heru Tri Widarto menyebut total luas lahan sawit 16,38 juta hektar, dan luas sawit rakyat 6,72 juta hektar. Sementara itu, potensi peremajaan sawit rakyat 2,78 juta hektar dengan sebaran dominan di Sumatera dan Kalimantan.

"Target PSR periode 2020-2022 tumbuh 180 ribu hektar setiap tahunnya. Targetnya di 21 provinsi dan 108 kabupaten/kota,"ucapnya dalam diskusi virtual bertajuk Peranan Kelapa Sawit Dalam Pengentasan Kemiskinan dan Menuju Gratieks yang digelar Forum Wartawan Pertanian.

Secara keseluruhan Ditjen Perkebunan menargetkan nilai ekspor komoditas utama , andalan dan pengembangan perkebunan periode 2020-2024 sebesar 74,31 milliar dollar AS. Itu setara dengan 1.040,33 trilliun rupiah.

Untuk mengejar seluruh target tersebut Ditjen Bun mendorong pengembangan logistik benih, meningkatkan produksi dan produkivitas, meningkatkan nilai tambah, daya saing dan ekspor.

"Kami juga mendorong modernisasi perkebunan , pembiayaan melalui KUR (kredit usaha rakyat), peningkatan kapasitas SDM (sumber daya manusia), optimasi jejaring stakeholder,"ucap Heru Tri

Diten Perkebunan juga menargetkan selama 20-20-2024 produksi perkebunan naik 7 persen per tahun, penyerapan tenaga kerja 5 persen, peningkatan PDB perkebunan 5 persen per tahun serta mengurangi losses 3 persen.

Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute Tungkot Sipayung menambahkan faktanya, penambahan perkebunan kelapa sawit menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan turun seiring dengan meningkatnya produksi CPO (crude palm oil)

Pertumbuhan perkebunan sawit di setiap daerah berkontribusi menurunkan kemiskinan, kondisi yang sama dialami oleh Malaysia, Thailand, Papua Newgini. "Jadi, di mana ada perkebunan sawit di situ kemiskinan turun karena ada tenaga kerja yang masuk ke sana. Tumbuh pusat pusat pertumbuhan ekonomi baru,"ucap Tungkot.

Kondisi itu beber Tungkot dialami oleh provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi, Kalimantan Selatan, serta Papua dan Papua Barat. "Pertumbuhan PDB (produk domestik bruto) kabupaten sawit lebih cepat dibanding kabupaten non sawit,"paparnya.

Bahkan, penurunan kemiskinan juga bukan hanya terjadi di Indonesia yang merupakan negara eksportir sawit, hal yang sama juga berlaku bagi negara importir. Kesempatan kerja yang tercipta pada hilirisasi di negara importir sawit. "Kitakan eksportir yah di negara importir juga, kesempatan kerja meningkat. Itu terjadi di India meningkat, China dan Uni Eropa.

Pendapatan negara importir sawit meningkat menjadi 38 milliardolarAS pada tahun 2020. Sebenarnya UE (Uni Eropa) hanya purapura saja menolak sawit sebab jika mereka tetap begitu hilang kesempatan kerja di sana, dan pendapatan turun,"papar Tungkot

Serap Tenaga Kerja

Pengamat Kehutanan dari Universitas Indonesia (UI) Bedjo Santoso mengungkapkan industri kelapa sawit mampu menyerap 16,2 juta orang tenaga kerja. Rinciannya, 4,2 juta tenaga kerja langsung dan 12 juta tenaga kerja tidak langsung. Devisa kelapa sawit tahun 2018 sebesar 240 trilliun rupiah. Itu sebagai tulang punggung perekonomian nasional. ● agus

PP NO. 7/2021 Dorong UMKM dan Koperasi "Naik Kelas"

Jakarta - Pada 2 Februari 2021 kemarin, Presiden RI Joko Widodo telah resmi menetapkan PP No. 7 tahun 2021 sebagai turunan dari Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. PP tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian dan pengembangan usaha guna meningkatkan kapasitas dan daya saing koperasi dan usaha mikro kecil dan menegah (UMKM).

■ **NERACA**

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta mengatakan bahwa PP tersebut merupakan jalan kemudahan bagi koperasi dan UMKM untuk naik kelas dan mendapatkan posisi yang setara dalam sistem perekonomian nasional.

"Termasuk di dalamnya mencakup aspek perlindungan dan kemudahan bagi pelaku koperasi dan UMKM," kata Budimanta.

Budimanta mencontohkan di Jepang, di mana tercipta kemitraan antara usaha kecil dan besar. Pola tang sama bisa dilakukan di Indonesia.

"PP ini merupakan jalan untuk memberikan kue lebih besar bagi koperasi dan UMKM. Bahkan, ini juga diatur dalam rencana pembangunan jangka menengah," ucap Budimanta.

Budimanta menegaskan, UU Cipta Kerja dan PP No. 7 yang mengatur secara khusus ini memberikan jalan kemudahan dan akses yang lebih cepat sehingga target dalam RPJMN dapat tercapai.

"PP ini banyak memberikan kemudahan bagi UMKM naik kelas," tegas Budimanta.

Selain itu, Budimanta menambahkan, kegiatan usaha dari UMKM bisa menjadi jaminan Kredit Program, bukan hanya dalam bentuk kolateral fisik, tapi bisa dilihat kelayakan usahanya.

"Selama feasible, mereka bisa mendapatkan dukungan pembiayaan seperti KUR," ungkap Budimanta.

Bahkan, dalam PP itu juga diatur mengenai skema pembayaran terhadap kemitraan usaha kecil dan besar.

"Misalnya, ada UKM menjadi supplier bagi industri besar, itu pembayaran diatur seberapa lama," tambah Budimanta.

Budimanta berharap, di level operasional dan implementasi, PP No. 7 ini perlu didukung bukan hanya di level KemenkopUKM.

"Level operasionalisasi ini juga butuh komitmen bersama, termasuk dari Pemda. Tanpa itu tidak akan bisa, karena UMKM itu tempatnya di daerah," harap Budimanta.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim mengungkapkan, "setelah PP tersebut diundangkan, Kementerian Koperasi dan UKM berkewajiban untuk menyosialisasikan PP tersebut kepada berbagai pihak."

Tujuan sosialisasi, lanjut Arif, agar berbagai aturan yang dimuat dalam PP dapat dimanfaatkan dengan optimal, baik oleh koperasi dan UMKM, maupun oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, serta Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM.

Menurut Arif, sosialisasi tersebut tak dapat berjalan secara optimal jika hanya dilaksanakan KemenkopUKM.

"Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi dan kerja bersama berbagai pihak agar sosialisasi PP tersebut dapat dilaksanakan dengan optimal," tandas Arif.

Melalui Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas), Arif meyakini bahwa sosialisasi dapat berjalan dengan lebih baik melalui program masing-masing K/L, baik pemerintah pusat maupun daerah dengan memanfaatkan fungsi kehumasan dan jaringan informasi yang ada.

Sebab, PP No. 7 Tahun 2021 juga memuat berbagai aturan kebijakan pada aspek kemudahan pendirian usaha, perizinan, fasilitasi, akses pembiayaan, akses ke rantai pasok, hingga akses pasar bagi koperasi dan UMKM.

Hal tersebut, diimplementasikan ke dalam berbagai program dan kegiatan pemerintah. Di antaranya, pemberian kapasitas tempat usaha dan biaya sewa yang hanya sebesar 30% dari harga sewa komersil kepada pelaku UKM, alokasi 40% pengadaan barang dan jasa pemerintah bagi Koperasi dan UKM, hingga dukungan 30% alokasi pada infrastruktur publik seperti rest area jalan tol, bandara, dan stasiun bagi koperasi dan UMKM untuk mengembangkan dan mempromosikan usahanya.

"Lebih dari itu, tercatat juga adanya kemudahan pendirian koperasi, kemitraan UKM dengan usaha besar, kemudahan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), dan sebagainya," jelas Arif.

Dengan disahkannya PP tersebut, salah satu prioritas Kementerian Koperasi dan UKM adalah penyusunan data tunggal yang akurat by name by address, yang dalam penyusunannya akan berkolaborasi dengan Badan Pusat Ststistik (BPS) serta bekerja sama dengan lintas K/L dalam pengelolaannya.

Kerja sama tersebut akan dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) sehingga mendapatkan afirmasi dari setiap K/L terkait.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Luhur Pradjarto menambahkan, dalam PP ini banyak termuat pasal-pasal yang memberikan kemudahan atau keringanan bagi koperasi dan UMKM. Salah satunya adalah Pasal 3 terkait dengan pendirian koperasi.

"Jelas dituliskan bahwa untuk mendirikan sebuah Koperasi Primer hanya dibutuhkan orang paling sedikit 9 orang. Sementara dulu untuk mendirikan koperasi dibutuhkan orang hingga puluhan dengan proses yang ribet," kata Luhur.

Kemudian, Pasal 19 terkait dengan perlindungan bagi koperasi di mana pemerintah pusat dan Pemda bisa menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi, serta menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah.

Dengan begitu, lanjut Luhur, tidak ada tumpang tindih usaha dengan badan usaha lain di suatu wilayah sama. Yang diperbolehkan adalah sinergi dan kolaborasi usaha.

"Dalam PP ini juga memberikan kemudahan bagi pelaku koperasi untuk bisa melakukan RAT (Rapat Anggota Tahunan) secara daring. Jadi, tidak perlu lagi repot-repot harus tatap muka membutuhkan banyak biaya," ujar Luhur. ● rin/gro

PT Duta Anggada Realty, Tbk

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Duta Anggada Realty, Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

A. Pada:
Hari/Tanggal : Selasa, 30 Maret 2021
Waktu : Pukul 10.16 WIB s.d 10.38 WIB
Tempat : ASSEMBLY HALL Citywalk Sudirman Lt.5 Jln. K.H. Mas Mansyur no.121, Jakarta Pusat
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :
- Perubahan Anggota Dewan Komisaris Perseroan

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.
Direksi:
Direktur Utama : Bapak VENTJE CHANDRAPUTRA SUARDANA
Direktur : Bapak RANDY ANGKOSUBROTO
Direktur : Bapak WIDYANTO TAUFIQ
Dewan Komisaris:
Komisaris : Ibu JOHANNA ZAKARIA

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 2.904.949.402 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 92,473% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

E. Tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara	100 %	0	0

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara:

1. Menerima baik pengunduran diri dari Bapak HADI SISWANTO selaku Komisaris Independen sebagaimana ternyata dari surat pengunduran diri tertanggal 17 November 2020 dan didalam suratnya bahwa efektifnya pengunduran dirinya adalah sejak tanggal surat pengunduran dirinya tersebut, dan Perseroan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak HADI SISWANTO atas segala dedikasinya selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.
Sehingga susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 17 November 2020 adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Bapak HARTADI ANGKOSUBROTO
Komisaris : Ibu JOHANNA ZAKARIA
Komisaris (Independen) : lowong
Direksi (tidak mengalami perubahan)
Direktur Utama : Bapak VENTJE CHANDRAPUTRA SUARDANA
Direktur : Bapak RANDY ANGKOSUBROTO
Direktur : Bapak WIDYANTO TAUFIQ
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut dihadapan Notaris, memberitahukan kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan atas perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Jakarta, 1 April 2021
Direksi Perseroan

PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk dan Entitas Anak

Kantor Pusat :
Wisma 46 Kota BNI Lt. 20
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220
Tel : (62-21) 5744848 Fax : (62-21) 57945832
E-mail : corporate@polychemindo.com
Website : www.polychemindo.com

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Dalam Dolar Amerika Serikat)

	31 Desember 2020	31 Desember 2019		31 Desember 2020	31 Desember 2019
ASET			**LIABILITAS DAN EKUITAS**		
ASET LANCAR			**LIABILITAS JANGKA PENDEK**		
Kas dan setara kas	11.041.822	13.585.236	Utang usaha kepada pihak ketiga	17.933.119	29.147.608
Aset keuangan lainnya	7.520.392	12.527.275	Utang lain-lain		
Piutang usaha			Pihak berelasi	171.743	172.200
Pihak berelasi	147	66.242	Pihak ketiga	110	51
Pihak ketiga - bersih	15.769.081	18.946.484	Biaya yang masih harus dibayar	2.441.668	1.668.942
Piutang lain-lain			Utang pajak	178.915	456.459
Pihak berelasi	3.515.292	6.779	Liabilitas kontrak	1.640.407	2.524.719
Pihak ketiga	147.457	255.129	Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	22.365.962	33.969.979
Persediaan	34.609.594	52.145.310	**LIABILITAS JANGKA PANJANG**		
Pajak dibayar dimuka	2.677.700	7.379.834	Liabilitas imbalan kerja	15.946.538	13.434.848
Uang muka	2.002.507	4.828.270	**JUMLAH LIABILITAS**	38.312.500	47.404.827
Biaya dibayar dimuka	693.134	645.211	**EKUITAS**		
Jumlah Aset Lancar	77.977.126	110.385.770	Modal saham - nilai nominal Rp 500 per saham		
ASET TIDAK LANCAR			Modal dasar - 8.500.000.000 saham		
Piutang lain-lain kepada pihak berelasi	-	3.014.124	Modal ditempatkan dan disetor - 3.889.179.559 saham	216.281.813	216.281.813
Aset pajak tangguhan - bersih	1.853.097	5.776.258	Tambahan modal disetor	58.441.593	58.441.593
Aset tetap - bersih	124.193.828	134.902.220	Penghasilan komprehensif lain	(7.721.337)	(1.918.346)
Properti investasi	1.276.657	-	Saldo laba (defisit)		
Uang muka pembelian aset tetap	426.160	1.093.858	Ditentukan penggunaannya	1.527.983	1.527.983
Lain-lain	37.300	55.965	Tidak ditentukan penggunaannya	(101.066.760)	(66.505.959)
Jumlah Aset Tidak Lancar	127.787.042	144.842.425	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	167.463.292	207.827.084
			KEPENTINGAN NON-PENGENDALI	(11.624)	(3.716)
			JUMLAH EKUITAS	167.451.668	207.823.368
JUMLAH ASET	205.764.168	255.228.195	**JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS**	205.764.168	255.228.195

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Dalam Dolar Amerika Serikat)

	Modal disetor	Tambahan modal disetor	Penghasilan komprehensif lain			Saldo laba (defisit)		Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	Kepentingan non-pengendali	Jumlah ekuitas
			Revaluasi investasi efek tersedia untuk dijual	Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	Ditentukan penggunaannya	Tidak ditentukan penggunaannya			
Saldo per 1 Januari 2019	216.281.813	58.441.593	9.153.305	(139.646)	(4.602.364)	1.527.983	(36.914.645)	243.748.039	27.923	243.775.962
Rugi tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	(29.591.314)	(29.591.314)	480	(29.590.834)
Jumlah rugi komprehensif tahun berjalan	-	-	(5.046.162)	(23.106)	(1.260.373)	-	-	(6.329.641)	(8.626)	(6.338.267)
Akuisisi kepentingan non-pengendali di entitas anak	-	-	-	-	-	-	-	-	(23.493)	(23.493)
Saldo per 31 Desember 2019	216.281.813	58.441.593	4.107.143	(162.752)	(5.862.737)	1.527.983	(66.505.959)	207.827.084	(3.716)	207.823.368
Reklasifikasi perubahan dari instrumen ekuitas kepada saldo defisit karena penerapan PSAK 71	-	-	(4.107.143)	-	-	-	4.107.143	-	-	-
Rugi tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	(38.667.944)	(38.667.944)	(8.101)	(38.676.045)
Jumlah rugi komprehensif tahun berjalan	-	-	-	19.179	(1.715.027)	-	-	(1.695.848)	193	(1.695.655)
Saldo per 31 Desember 2020	216.281.813	58.441.593	-	(143.573)	(7.577.764)	1.527.983	(101.066.760)	167.463.292	(11.624)	167.451.668

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Dalam Dolar Amerika Serikat)

	2020	2019
PENJUALAN BERSIH	152.712.749	233.390.689
BEBAN POKOK PENJUALAN	170.623.336	252.062.560
RUGI BRUTO	(17.910.587)	(18.671.871)
Penghasilan investasi	441.839	380.670
Keuntungan kurs mata uang asing - bersih	321.463	444.793
Beban penjualan	(1.094.269)	(1.506.880)
Beban umum dan administrasi	(6.262.872)	(7.023.378)
Beban keuangan	(317.642)	(562.885)
Kerugian neto atas investasi pada instrumen ekuitas yang ditetapkan pada FVTPL	(4.937.051)	-
Keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih	(4.931.430)	(2.808.794)
RUGI SEBELUM PAJAK	(34.690.549)	(29.748.345)
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN	(3.985.496)	157.511
RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN	(38.676.045)	(29.590.834)
(KERUGIAN) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(1.715.027)	(1.260.373)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Perubahan nilai wajar efek yang belum direalisasi	-	(5.054.555)
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	19.372	(23.339)
Jumlah kerugian komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak	(1.695.655)	(6.338.267)
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(40.371.700)	(35.929.101)
RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik Entitas Induk	(38.667.944)	(29.591.314)
Kepentingan Non-pengendali	(8.101)	480
Rugi Bersih Tahun Berjalan	(38.676.045)	(29.590.834)
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik Entitas Induk	(40.363.792)	(35.920.955)
Kepentingan Non-pengendali	(7.908)	(8.146)
Jumlah Rugi Komprehensif Tahun Berjalan	(40.371.700)	(35.929.101)
RUGI PER SAHAM DASAR	(0,0099)	(0,0076)

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Dalam Dolar Amerika Serikat)

	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan dan lainnya	158.320.306	238.922.652
Pembayaran kas kepada karyawan	(9.560.569)	(8.655.469)
Pembayaran kas kepada pemasok dan untuk beban operasional lainnya	(151.237.099)	(220.507.904)
Kas (digunakan untuk) dihasilkan dari operasi	(2.477.362)	9.759.279
Penerimaan restitusi pajak penghasilan	1.969.530	2.064.876
Pembayaran pajak penghasilan	(828.828)	(1.804.139)
Pembayaran bunga dan beban keuangan	(317.642)	(562.885)
Kas Bersih (Digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas Operasi	(1.654.302)	9.457.131
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Hasil penjualan aset tetap	143.884	144.046
Penerimaan bunga	281.417	133.733
Perubahan utang untuk pembelian aset tetap	(6.768)	(116.115)
Pembayaran uang muka pembelian aset tetap	(426.160)	(1.093.858)
Perolehan aset tetap	(970.496)	(3.790.652)
Pencairan (penambahan) aset keuangan lainnya - bersih	69.832	(2.699.080)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(908.291)	(7.421.926)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pembayaran wesel bayar jangka panjang, merupakan kas bersih yang digunakan dalam aktivitas pendanaan	-	(2.712.972)
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(2.562.593)	(677.767)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	13.585.236	14.090.912
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	19.179	172.091
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	11.041.822	13.585.236

Catatan:

1. Informasi keuangan pada dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 di atas diambil dari laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (anggota dari Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte), yang telah memberikan opini tanpa modifikasian dengan paragraf hal lain.
2. Rugi per saham dasar dihitung berdasarkan jumlah rata-rata tertimbang saham beredar sebanyak 3.889.179.559 pada 31 Desember 2020 dan 2019.

Jakarta, 1 April 2021
D I R E K S I
PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk

Jakarta, 1 April 2021

No : 0092/DAR/IV/21

Kepada Yth.
OTORITAS JASA KEUANGAN
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

U.P. : **Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa**

Perihal : **Penyampaian Resume dan Bukti Iklan Hasil RUPSLB PT Duta Anggada Realty Tbk tanggal 30 Maret 2021**

Dengan hormat,

Merujuk kepada Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi butir IV.6, maka dengan ini kami sampaikan bahwa PT Duta Anggada Realty Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu sebagai berikut :

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

A. Pada:

Hari/Tanggal	:	Selasa, 30 Maret 2021
Waktu	:	Pukul 10.16 WIB s.d 10.38 WIB
Tempat	:	ASSEMBLY HALL Citywalk Sudirman Lt. 5 Jln. K.H. Mas Mansyur No.121, Jakarta Pusat

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :
1. Perubahan Anggota Dewan Komisaris Perseroan

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

Direksi:		
Direktur Utama	:	Bapak VENTJE CHANDRAPUTRA SUARDANA
Direktur	:	Bapak RANDY ANGKOSUBROTO
Direktur	:	Bapak WIDYANTO TAUFIQ
Dewan Komisaris:		
Komisaris	:	Ibu JOHANNA ZAKARIA

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 2.904.949.402 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 92,473% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara	100 %	0	0

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama :

1. Menerima baik pengunduran diri dari Bapak Hadi Siswanto selaku Komisaris Independen sebgaimana ternyata dari surat pengunduran dirinya tertanggal 17 November 2020 dan di dalam suratnya bahwa efektifnya pengunduran dirinya adalah sejak tanggal surat pengunduran dirinya tersebut, dan Perseroan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Hadi Siswanto atas segala dedikasinya selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.

   Sehingga susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 17 November 2020 adalah sebagai berikut:

   Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	:	Bapak HARTADI ANGKOSUBROTO
Komisaris	:	Ibu JOHANNA ZAKARIA
Komisaris Independen	:	lowong
Direksi		
Direktur Utama	:	Bapak VENTJE CHANDRAPUTRA SUARDANA
Direktur	:	Bapak RANDY ANGKOSUBROTO
Direktur	:	Bapak WIDYANTO TAUFIQ

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut di hadapan Notaris, memberitahukan, kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan atas perubahan susunan Pengurus Perseroan tersebut serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut

Bersama ini kami lampirkan pula bukti iklan pemberitahuan ringkasan risalah Rapat tersebut yang kami umumkan pada tanggal 1 April 2021 masing-masing di surat kabar Investor Daily dan Harian Ekonomi Neraca.

Demikianlah surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Duta Anggada Realty Tbk.

Aka Permata
(Corporate Secretary)

Tembusan :
1. Yth. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 2 – PT Bursa Efek Indonesia
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

INVESTOR DAILY

LELANG JEMBATAN BATAM-BINTAN SEMESTER II

13 Proyek KPBU Rp 168 T Siap Ditawarkan

Oleh **Muawwan Daelami**

▶ JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Eko Djoeli Heripoerwanto mengatakan, sebanyak 13 proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) senilai Rp 168,84 triliun siap ditawarkan tahun ini.

"Proyek KPBU yang *ready to offer* di tahun 2021 yang sudah masuk daftar rencana KPBU ada 12 terkait dengan jalan dan jembatan. Dan satu dari sektor perumahan ada proyek Rumah Susun Cisaranten Bina Harapan," kata Eko dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR, di Jakarta, Rabu (31/3).

Eko Djoeli Heripoerwanto

Adapun 13 proyek KPBU yang siap ditawarkan tersebut adalah Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg, Jembatan Batam-Bintan, Tol Mamminasata, Tol Sentul Selatan-Karawang Barat, Tol Bogor-Serpong via Parung, Tol Gilimanuk-Mengwi (PQ), penggantian dan/atau duplikasi Jembatan Calendar Hamilton (CH) di Pulau Jawa (PQ), Tol Akses Patimban, Tol Semanan-Balaraja, Tol Semarang Harbour/ Semarang Kendal, Tol Cikunir - Karawaci Elevated, Tol JORR Elevated Ruas Cikunir - Ulujami dengan total panjang keseluruhan mencapai 447,067 km, dan Rusun Cisaranten, Bina Harapan sebanyak 2.738 unit.

Selain 13 proyek tersebut, Eko menyebut Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ir H Djuanda juga sudah masuk kategori proyek KPBU yang siap ditawarkan tahun 2021. Artinya, proyek dengan nilai investasi Rp 14,7 triliun yang memiliki *output* 7.000 liter per detik ini sudah siap dilakukan pelelangan.

Sedangkan 13 proyek lain senilai Rp 133,26 triliun sedang diusulkan untuk masuk daftar perencanaan KPBU. Proyek-proyek tersebut di antaranya Jalan Tol Cilacap-Yogyakarta, Tol Demak-Tuban, Tol Jember-Lumajang, Tol Ngawi-Bojonegoro-Babat, Tol Jember-Situbondo, Tol Tulungagung -Kepanjen, Jembatan Muna-Buton, Jembatan Pulau Laut Tanah Bumbu, OM Jembatan Suramadu, Tol Malang -Kepanjen, Tol Trans Papua, Tol Kediri-Tulungagung dengan total panjang keseluruhan mencapai 779,5 km.

Dengan demikian, total nilai investasi proyek KPBU yang siap ditawarkan dan sedang diusulkan untuk masuk daftar rencana KPBU adalah Rp 302,1 triliun dengan jumlah 26 proyek. Sementara, proyek KPBU yang masih dalam tahap penyiapan tahun anggaran (TA) 2021 atau kelayakan studi (*feasibility studies*) terbagi menjadi dua. Pertama, terkait kajian awal prastudi kelayakan atau *outline business case* (OBC) terdapat lima proyek ruas jalan dan jembatan, dua proyek sumber daya air (SDA), enam proyek perumahan, dan lima proyek permukiman.

Kelima proyek ruas jalan dan jembatan tersebut Jalan Bebas Hambatan Non Tol Lingkar Luar IKN, KM 13 Outer Ringroad IKN, Jalan Akses Exit Toll, Tol Lingkar Selatan Bandung, dan Tol Pejagan - Cilacap dengan total nilai investasi Rp 113,08 triliun dan panjang keseluruhan mencapai 717,9 km.

Kemudian dua proyek SDA yaitu Bendungan Wairoro dan Sistem Pengairan Air Baku (SPAB) Sindang Heula. Ditambah tiga proyek dari sektor permukiman seperti Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Regional Legok Nangka, PSEL Sarbagita, PSEL Tangerang Selatan.

"Khusus untuk proyek perumahan dan permukiman, Menteri PUPR bukan bertindak selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), melainkan hanya sebagai pembina teknis," ujar dia.

Selanjutnya, untuk *final business case* (FBC) atau kajian yang bersifat final untuk sektor jalan dan jembatan terdapat 11 proyek ruas, tiga proyek dari sektor SDA, lima proyek dari sektor perumahan, dan tiga proyek dari sektor permukiman.

"Jadi, di FBC ini kalau *timeline*-nya tepat waktu, maka di kuartal III-2021, *insya Allah* nanti di Kuartal IV atau paling lambat awal 2024 sudah bisa ditawarkan dalam bentuk lelang," tutur Eko.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) Kementerian PUPR, status proyek KPBU mulai dari usulan, penyiapan hingga transaksi tercatat sebanyak 145 proyek dengan total nilai investasi Rp 1.300.66 triliun. Sebanyak 145 proyek tersebut terdiri atas kategori KPBU 63 proyek, penyiapan 58 proyek, dan kategori transaksi 24 proyek.

Sebelumnya Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit mendorong bank -bank daerah, Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan sindikasi untuk masuk ke sektor proyek jalan tol.

BeritaSatu Photo/Ruht Semiono

Pengelolaan Sumber Daya Air dan Listrik Waduk Ir H Djuanda

Petugas melakukan pengamanan objek vital nasional di Waduk Ir H Djuanda, Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (31/3/2021). Jasa Tirta II mengelola waduk Ir H Djuanda yang mengairi areal pertanian sekitar 240.000 hektare mendukung produksi padi sebanyak 3,3jt ton/tahun atau setara dengan nilai rupiah sebesar 13,86 triliun /tahun dan mengelola Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Ir H Djuanda dengan kapasitas total daya terpasang sebesar 187.5 megawatt.

"Ke depan kita ingin sekali mendorong lembaga keuangan banyak masuk di sektor jalan tol. Karenanya, saya menaruh perhatian kepada bank-bank daerah, BPD, dan sindikasi, sebab banyak *resources* di BPD terutama untuk membiayai tol-tol di daerah di mana jalan tol itu berada," ucap Danang baru-baru ini.

Jembatan Batam-Bintan

Di sisi lain, Eko Djoeli Heripoerwanto menargetkan proyek Jembatan Batam-Bintan dilelang pada kuartal II-2021.

"Jembatan Batam-Bintan sudah lama jadi isu nasional. Jadi, penyiapan lelangnya dari *update* terakhir akan berlangsung di kuartal II 2021," ucap Eko.

Saat ini, proyek jembatan yang diperkirakan memiliki panjang 7,685 km hingga 14,749 km ini masih perlu dilihat kembali (*review*) dari sisi teknis dan finansial karena ada asumsi perubahan.

"Misalnya, ada permintaan untuk penambahan jalur motor di Jembatan Batam-Bintan yang itu akan berimplikasi pada investasi," jelas Eko.

Belum lagi, dengan penambahan lebar jembatan tol yang semula 26 meter sekarang diminta menjadi 32 meter karena keharusan untuk menyediakan jalur motor sehingga hal ini perlu dilihat kembali.

Eko menambahkan, jika secara ekonomi pembangunan Jembatan Batam-Bintan *feasible* tapi secara finansial tidak, DJPI akan menyiapkan dukungan pemerintah dan hal itu harus dibicarakan dengan kementerian/lembaga (K/L) lain.

"Inilah kenapa yang membuat kami menggeser jadwal lelang (Jembatan Batam-Bintan) dari jadwal semula," ungkapnya.

MUDIK DILARANG

Pemerintah Perlu Pertimbangkan Insentif untuk Usaha Transportasi

JAKARTA - Wakil Ketua DPR M Azis Syamsuddin mendorong Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mempertimbangkan pemberian insentif bagi perusahaan jasa transportasi umum yang terdampak kebijakan larangan mudik.

"Kebijakan larangan mudik jika tidak diiringi aturan terkait transportasi dikhawatirkan tidak efektif untuk menekan mobilisasi. Di sisi lain, kebijakan ini mengakibatkan perusahaan transportasi merugi. Karena itu, DPR mendorong Kemenhub untuk mempertimbangkan pemberian insentif bagi perusahaan jasa transportasi umum yang terdampak," kata Azis Syamsuddin pernyataan resminya, Rabu (31/3).

Selain insentif, dia juga mendorong Kemenhub segera mengeluarkan aturan tentang pelarangan operasional transportasi umum untuk kegiatan mudik. Hal tersebut mengingat pentingnya aturan itu agar upaya menekan mobilisasi masyarakat saat libur lebaran dapat berjalan secara efektif.

Azis juga mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 untuk menjadikan hasil evaluasi libur lebaran tahun lalu dan libur awal tahun baru 2021 sebagai dasar penyusunan petunjuk teknis larangan mudik.

Sebelumnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan pihaknya tengah menyusun aturan pengendalian transportasi sebagai tindak lanjut pelarangan mudik.

Kaji Ulang

Sementara itu, sejumlah penyedia jasa transportasi umum di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, berharap larangan mudik bagi masyarakat pada libur Lebaran 2021 dikaji ulang karena dipastikan berdampak signifikan terhadap bisnis transportasi setelah selama setahun terdampak pandemi Covid-19.

"Sejak pandemi Covid-19 hingga sekarang, usaha kami belum pulih sepenuhnya. Bahkan, kembali pulih 50% saja belum bisa karena kenyataan di lapangan memang minim penumpang," kata Kepala Operasional Perusahaan Otobus (PO) Nusantara Kudus Soni Wibowo di Kudus, kemarin.

Mudik Lebaran, kata dia, bagi bisnis transportasi umum memang sangat diharapkan karena bisa disebut masa panen untuk mendapatkan pemasukan yang lebih besar dibandingkan hari-hari biasa. Untuk itulah, dia berharap ada kelonggaran aturan soal mudik Lebaran agar pelaku bisnis transportasi umum masih bisa mendapatkan pemasukan untuk menutupi biaya operasional yang cukup tinggi.

"Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada pemasukan perusahaan, bahkan karyawan juga ikut terdampak karena pemasukan minim akhirnya mengundurkan diri untuk beralih profesi," ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan Haryanto sebagai pemilik PO Haryanto yang mengakui dampak pandemi cukup signifikan, karena hingga kini sektor transportasi masih belum sepenuhnya bangkit

Bahkan, kinerja perusahaannya juga mengalami penurunan hingga 75% karena merosotnya jumlah pendapatan seiring berkurangnya jumlah penumpang yang naik bus umum. Beruntung pihaknya yang mempekerjakan 2.000 karyawan tidak sampai melakukan pemutusan PHK.

Untuk itu, ia berharap pemerintah memikirkan kembali kebijakan tersebut karena hingga kini sektor transportasi belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19. (**tm/ant**)

CVR Pesawat Sriwijaya Ditemukan

JAKARTA - Kotak hitam bagian *cockpit voice recorder* (CVR) pesawat Sriwijaya Air registrasi PK-CLC berhasil ditemukan pada Selasa (30/3) malam. Proses serah terima CVR secara simbolis dilakukan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi kepada Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Soerjanto Tjahjono pada Rabu (31/3) di Dermaga JITC II, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

"*Alhamdulillah* Selasa (30/3) malam pukul 20.00 WIB CVR Sriwijaya Air SJ-182 ditemukan di tempat yang tidak jauh dari tempat ditemukannya FDR (*flight data recorder*)," kata Menhub Budi di Jakarta, Rabu (31/3).

Menhub Budi menyampaikan apresiasi kepada KNKT, Badan SAR Nasional (Basarnas), TNI, Polri, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu, jajaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub), instansi terkait, dan para relawan serta masyarakat Kepulauan Seribu yang telah bahu-membahu berupaya secara maksimal dalam operasi pencarian baik korban, puing-puing pesawat, hingga kotak hitam FDR dan CVR.

Penemuan CVR ini adalah sebagai tindak lanjut operasi pencarian di mana pada 12 Januari 2021 FDR pesawat Sriwijaya Air SJ-182 telah ditemukan. CVR adalah perekam audio yang mencatat rekaman percakapan pilot dan suara-suara yang timbul di area *cockpit* pesawat.

Menhub menjelaskan, nantinya data yang ada dalam CVR akan melengkapi data yang telah diperoleh sebelumnya dalam FDR.

"Data itu tentu berharga dan KNKT sudah menemukan banyak hal dari FDR. Investigasi akan paripurna apabila dilakukan penggabungan antara apa yg terjadi di cockpit, yaitu pembicaraan antara pilot dan kopilot dengan apa yang ada di FDR," jelas Menhub.

Menhub mengharapkan, KNKT dapat melakukan investigasi secara mendalam dan segera menyampaikan hasil investigasi.

"Harapan kami KNKT bisa melakukan suatu penelitian yang detail dan menyampaikan apa yang ditemukan dalam CVR ini. Saya harapkan ketua KNKT bisa melakukan dengan baik," ucap Menhub.

Sementara itu, Ketua KNKT Soerjanto mengatakan, upaya pencarian CVR ini menggunakan kapal penghisap lumpur. Hal ini dilakukan karena lokasi pencarian CVR seluas 90 x 90 meter persegi itu dipenuhi lumpur.

CVR dari pesawat Sriwijaya SJ-182, ujar dia, ditemukan pada hari 30 Maret 2021 pukul 20.05 WIB oleh Tim KNKT. CVR berhasil tersedot melalui *nozzle dredger* Kapal Dredging King Arthur 8 di area sekitar lokasi jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ 182. CVR kemudian diangkut oleh Kapal Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) KN. Alugara/ P114 ke Dermaga JICT II pada Rabu (31/3) siang.

Soerjanto menyatakan, pencarian CVR yang melibatkan tim dari unsur TNI hingga warga Kepulauan Seribu sempat tidak membuahkan hasil. Hal ini karena ada kendala lumpur dan puing yang menghalangi pencarian CVR tersebut. Kemudian, tim memutuskan untuk menggunakan kapal penyedot lumpur di area pencarian.

"Kami lakukan pencarian seperti sedot lumpur seperti *vacum cleaner*. Ini sebenarnya seperti kita cari jarum di tengah jerami," tambah dia.

Soerjanto menyebutkan, tim pencari sempat ingin menyerah lantaran setelah empat hari pencarian CVR tak kunjung ditemukan.

"Saya *engggak* bisa jawab kalau CVR-nya *enggak* ketemu. Saya apa pun usahanya sampai kami menyerah semuanya, dan kami nyatakan, kami tidak sanggup," tutur dia.

Namun, jelas dia, usaha timnya tidak sia-sia karena pada malam terakhir pencarian CVR itu akhirnya ditemukan.

"*Alhamdulillah* malam terakhir kita pencarian," sebut dia.

Soerjanto mengungkapkan, CVR akan diteliti lebih lanjut, yakni terkait hal ini akan memerlukan waktu kurang lebih satu pekan.

"CVR ini nanti kami bawa ke laboratorium, dan kami akan proses untuk pembacaan yang memerlukan waktu kurang lebih antara tiga hari sampai satu minggu. Setelah itu akan kami gabungkan dengan apa yang kami temukan di FDR dengan apa yang terjadi di cockpit seperti yang terekam dalam CVR. Tanpa CVR, kasus Sriwijaya SJ-182 ini akan sangat sulit ditentukan penyebabnya," ujar dia.

Soerjanto menegaskan, pihaknya akan menyampaikan hasil investigasi dan rekomendasi mengenai penyebab kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ-182 secara transparan. Dengan adanya rekomendasi dari KNKT diharapkan kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari.

"Kami dari pemerintah memang serius melakukan investigasi dan sesuai dengan pesan Bapak Presiden untuk membuka setransparan mungkin apa yang menjadi penyebab agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari," ucap Soerjanto. (**esa**)

PT Duta Anggada Realty, Tbk

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Duta Anggada Realty, Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

A. Pada:
Hari/Tanggal : Selasa, 30 Maret 2021
Waktu : Pukul 10.16 WIB s.d 10.38 WIB
Tempat : ASSEMBLY HALL Citywalk Sudirman Lt.5 Jln. K.H. Mas Mansyur no.121, Jakarta Pusat

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :
- Perubahan Anggota Dewan Komisaris Perseroan

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.
Direksi:
Direktur Utama : Bapak VENTJE CHANDRAPUTRA SUARDANA
Direktur : Bapak RANDY ANGKOSUBROTO
Direktur : Bapak WIDYANTO TAUFIQ
Dewan Komisaris:
Komisaris : Ibu JOHANNA ZAKARIA

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 2.904.949.402 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 92,473% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

E. Tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara	100 %	0	0

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara:

1. Menerima baik pengunduran diri dari Bapak HADI SISWANTO selaku Komisaris Independen sebagaimana ternyata dari surat pengunduran diri tertanggal 17 November 2020 dan didalam suratnya bahwa efektifnya pengunduran dirinya adalah sejak tanggal surat pengunduran dirinya tersebut, dan Perseroan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak HADI SISWANTO atas segala dedikasinya selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.
Sehingga susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 17 November 2020 adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Bapak HARTADI ANGKOSUBROTO
Komisaris : Ibu JOHANNA ZAKARIA
Komisaris (Independen) : lowong
Direksi (tidak mengalami perubahan)
Direktur Utama : Bapak VENTJE CHANDRAPUTRA SUARDANA
Direktur : Bapak RANDY ANGKOSUBROTO
Direktur : Bapak WIDYANTO TAUFIQ
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut dihadapan Notaris, memberitahukan kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan atas perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Jakarta, 1 April 2021
Direksi Perseroan

astragraphia
member of ASTRA

RALAT PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2021
KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT ASTRA GRAPHIA Tbk
("Perseroan")

Merujuk pada iklan Perseroan pada tanggal 23 Maret 2021 tentang Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2021, dan merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, khususnya pasal 19 ayat (1), Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan ralat pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan terkait informasi tambahan bagi pemegang saham atau kuasanya yang berhak hadir dalam Rapat:

1. Pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat/ke gedung tempat penyelenggaraan Rapat pada tanggal Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:
   a. pada saat kedatangan di gedung tempat penyelenggaraan Rapat:
      - wajib menyerahkan **Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR Covid-19** atas nama dirinya yang menunjukan hasil negatif dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal tes **1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat (untuk Tes Rapid Antigen) dan 2 (dua) hari sebelum tanggal Rapat (untuk Tes Swab PCR)**;
      - wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang telah diisi dengan informasi kesehatan dan perjalanannya. Formulir deklarasi kesehatan dapat diunduh pada www.astragraphia.co.id; dan
      - wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh, dsb.), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat
   b. setiap saat selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung:
      - wajib menggunakan masker 3 ply secara benar; dan
      - wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat
   c. wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat setelah Rapat selesai.
2. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam, dan/atau flu, dsb)) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
3. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.
4. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul **12:30 WIB**. Proses registrasi akan ditutup pada pukul **13:45 WIB**.

Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang belum melakukan registrasi sampai dengan pukul **13:45 WIB**, tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat.

Jakarta, 1 April 2021
Direksi Perseroan